

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Oleh:

INDAH MUTIARA SAFITRI

NIM 4317016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

INDAH MUTIARA SAFITRI

NIM 4317016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Mutiara Safitri

NIM : 4317016

Judul Skripsi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Indah Mutiara Safitri

NOTA PEMBIMBING

Ade Gunawan, M.M

Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kajen

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indah Mutiara Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi

Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Indah Mutiara Safitri

NIM : 4317016

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Studi Kasus LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Pembimbing,



Ade Gunawan, M.M

NIP. 198104252015031002

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan dan rezeki yang sangat tidak terbatas
2. Almarhum Bapak Amin Imron dan Ibu tercinta Darwati , terimakasih atas segala kasih sayang, cinta dan doa dari Bapak dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku, selalu memberi dukungan penuh dalam setiap perjalanan meraih cita-cita.
3. Kakakku satu satunya Agung Teguh Satria, serta teman temanku Risma, Vera, Dasy, Falah, Dian, Diyah, Ela, Nisa, Nila, Fifa dan Ninda.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang mendukung dalam selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, semoga kita sukses selalu.
7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini

ABSTRAK

INDAH MUTIARA SAFITRI. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020).

Pengungkapan laporan keuangan adalah data minimal yang harus diungkapkan oleh entitas keuangan termasuk entitas sektor publik. Namun berdasarkan penelitian awal ditemukan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah hanya melakukan pengungkapan sebesar 57,02 % dalam rentang waktu 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini yang untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit dan tingkat ketergantungan daerah terhadap Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini dalam memilih sampel menggunakan *proposive sampling* terdapat 35 LKPD terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel pada tahun 2016-2020. Sumber data yang dilakukan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laman resmi BPK dan Data non Keuangan Meliputi Total DPRD melalui perpustakaan BPS. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan aplikasi olah data SPSS 26.0.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (2) Tingkat Kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (3) Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (4) Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (5) Tingkat Ketergantungan Daerah t berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kata kunci: Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit Dan Tingkat Ketergantungan Daerah, Tingkat Pengungkapan LKPD

ABSTRACT

INDAH MUTIARA SAFITRI. Factors That Influence the Level of Disclosure of Regional Government Financial Reports (Case Study of Regency/City LKPD in Central Java Province 2016-2020).

Financial report disclosure is the minimum data that must be disclosed by financial entities including public sector entities. However, based on initial research, it was found that regional governments in Central Java only made 57.02% disclosures in the 2014-2018 period. The aim of this research is to determine the influence of government size, level of regional independence, legislative size, audit findings and level of regional dependence on the level of disclosure of regional government financial reports in districts/cities in Central Java Province

In this research, selecting samples used proportional sampling, there were 35 LKPD consisting of 29 districts and 6 cities. Sample in 2016-2020. The data sources used are secondary data obtained from the official BPK website and non-financial data including DPRD totals through the BPS library. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the SPSS 26.0 data processing application.

The research results show: (1) The size of the government has no effect on the level of LKPD disclosure (2) The level of regional independence has a negative effect on the level of LKPD disclosure (3) The size of the legislature has no effect on the level of LKPD disclosure (4) Audit findings have no effect on the level of LKPD disclosure (5) The level of regional dependency t has a negative effect on the level of LKPD disclosure

Keywords: Government Size, Level of Regional Independence, Legislative Size, Audit Findings and Level of Regional Dependence, Level of LKPD Disclosure

KATA PENGANTAR

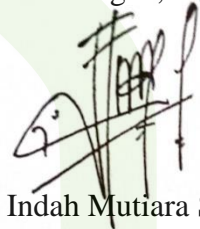
Alhamdulillah puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW., dengan harapan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.M.,M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., C.A. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Agus Arwani M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Ade Gunawan, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah bermanfaat memberikan ilmu bagi penulis.
9. Orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

10. Semua teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman dekat saya yang telah memberi semangat dan memberikan bantuan serta pengarahan pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap dan memohon kepada Allah SWT. agar memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan bagi orang lain.

Pekalongan, 17 Oktober 2023



Indah Mutiara Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Manfaat	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Stakeholder	11
2. Teori Stewardship.....	12
3. Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behaviour).....	14
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
5. Pengungkapan LKPD Dalam Calk	16
6. Ukuran Pemerintah Daerah.....	17
7. Tingkat Kemandirian Daerah	19

8. Jumlah Legislatif	21
9. Temuan Audit	23
10. Tingkat Ketergantungan Daerah.....	24
B. Telaah Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir.....	36
D. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan desain Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Setting Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Variabel Penelitian.....	44
F. Sumber Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DATA DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Keterbatasan Penelitian.....	81
C. Implikasi.....	82
D. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka.....	28
Tabel 3.1 Nama Kabupaten/ Kota Jawa Tengah	43
Tabel 4.1 Daftar Sampel Pemda Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah.	54
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas.....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastistas.....	59
Tabel 4.6 Hasil Autokorelasi Durbin Watson.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	65
Tabel 4.9 Uji t.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji F	70

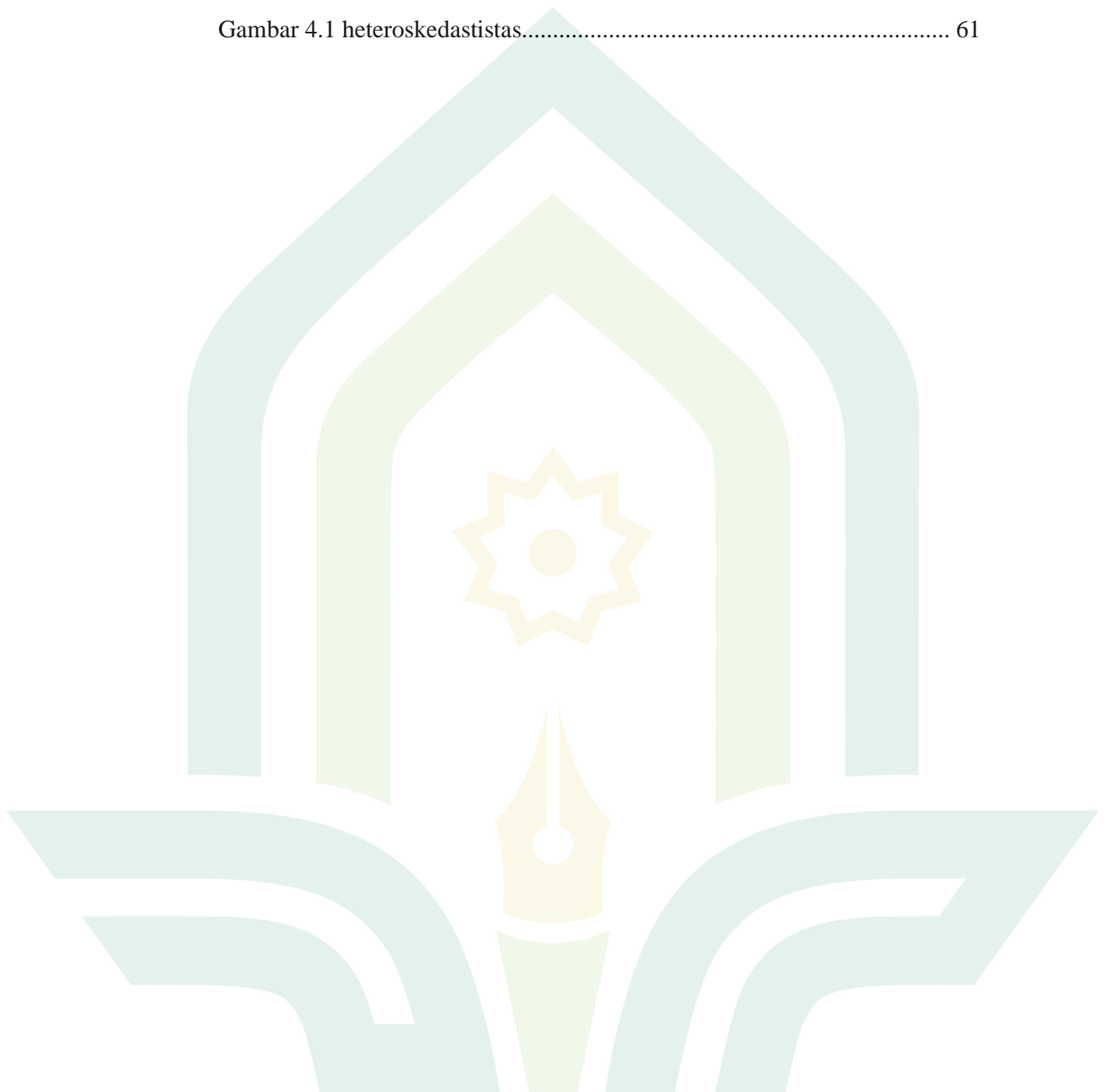
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	36
-----------------------------------	----



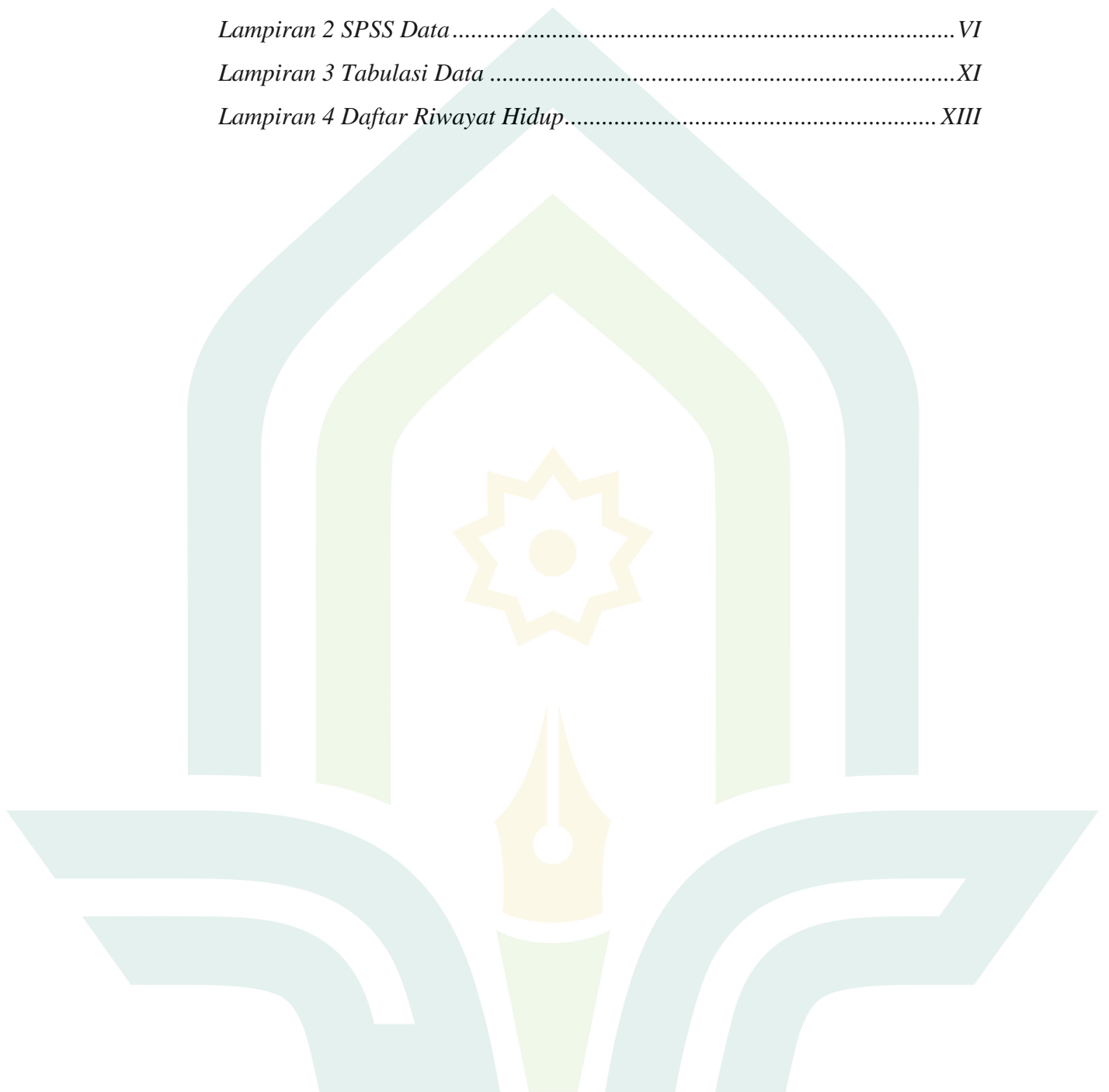
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengungkapan LKPD Jawa Tengah 2014-2018.....	3
Gambar 4.1 heteroskedastistas.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Surat Izin Penelitian</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2 SPSS Data</i>	<i>VI</i>
<i>Lampiran 3 Tabulasi Data</i>	<i>XI</i>
<i>Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....</i>	<i>XIII</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat pemda), otonomi daerah dan desentralisasi fiscal mulai diterapkan di Indonesia. Dimana sebagian urusan pemerintah pusat dialihkan ke pemda dengan tujuan untuk mengelola pemerintahan dengan baik dan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintahan yang bersih perlu adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya yang disusun berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP yang merupakan substitusi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

PP Nomor 71 Tahun 2010 berisi tentang SAP berprinsip akrual sedangkan PP Nomor 24 Tahun 2005 berisikan SAP berprinsip kas (Mardiasmo, 2009). Dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan presiden, gubernur, bupati, dan walikota harus mempertanggungjawabkan laporan hasil pelaksanaan APBN/APBD yang memuat Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

Laporan keuangan ialah suatu proses mengumpulkan, mengolah, serta memberitahukan informasi yang berguna dalam membuat keputusan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan menjadi suatu teknik

pertanggungjawaban serta pedoman mengambil keputusan sehingga dalam penyajian harus jelas dan terhindar dari kesalahpahaman. Setelah diperiksa BPK nantinya akan menghasilkan sebuah opini, salah satunya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maksudnya pengungkapan dalam pemerintah tersebut dinyatakan baik dan terpercaya. Menurut Efendy (2013) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti, 2018) memaparkan bahwa opini ini diperoleh dengan kriteria seperti, LKPD sesuai SAP, pengungkapan yang memadai, patuh terhadap UU, dan efektivitas SPIP. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, artinya terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan LKPD.

Penyajian dan pengungkapan LKPD sesuai SAP memuat tentang ketaatan terhadap anggaran dan urgensi pengungkapan informasi keuangan bagi pengguna. Tujuannya yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan terkait pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai bentuk pencapaian atas pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Mengutip berita dari “katadata.co.id” informasi mengenai BPK ditemukan adanya 14.964 kasus terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) tahun 2019 organisasi publik. Kasus tersebut diakibatkan karena kurangnya sistem pengendalian internal dan tidak patuhnya terhadap aturan UU dalam mengungkapkan informasi keuangan. Kerugian Negara ditaksir sebesar 10,35 triliun rupiah.

Gambar 1.1
Tingkat Pengungkapan LKPD Jawa Tengah 2014-2018



Sumber : Data BPK yang sudah diolah, 2019

Menurut www.jatengprov.go.id Pemprov Jawa Tengah mendapat nilai tertinggi penghargaan keterbukaan informasi publik pada 26 oktober 2021 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Jawa Tengah memperoleh penghargaan ini 4 kali sejak 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pemda terus berkembang.

Beberapa hasil riset menunjukkan rata-rata pengungkapan pada LKPD Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2014 hingga 2018 dibawah 60%. Rinciannya sebagai berikut 55,30% (2014), 55,59% (2015), 60% (2016), 56,18% (2017) dan 58% (2018). Penelitian sama dilakukan oleh Agustiningasih, Murni, & Putri (2017) sebesar 65%, Laupe, Saleh, Ridwan, & Mattulada (2018) sebesar 85%. Suparno & Nanda (2016) sejumlah 44,33% serta Simbolon & Kurniawan (2018) sebesar 38,32%.

Hasil riset terdahulu menyatakan bahwa tingkat pengungkapan yang

ada di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2014-2018 dikatakan rendah. Hal ini membuat ulasan yang menarik untuk diteliti terkait penyebab rendahnya tingkat pengungkapan terhadap LKPD Provinsi Jawa Tengah yang dihubungkan dengan variabel yang berbeda dan teori yang berkaitan. Berita dalam “katadata.co.id” menjadikan pertama kasus mengenai pengungkapan diketahui. Selanjutnya adanya riset terdahulu yang rata-rata hanya sebesar 57,02% selama 5 tahun (2014-2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Yang pertama yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Semakin besar ukuran Pemda maka semakin memudahkan pemda dalam menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahan karena dapat memberi kelancaran dalam memperoleh PAD (Azis, 2016 dalam Sari & Mustanda, 2019). Secara umum pemda yang memiliki ukuran besar akan memiliki total asset yang besar. Sehingga total asset yang besar mendorong pemda dalam mempublikasikan LKPD sebagai bukti bahwa pemda telah melakukan

Kemudian tingkat kemandirian daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini mempunyai arti bahwa bagaimana kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Suparno & Nanda (2016) semakin mandiri pemda dalam membiayai kegiatannya maka semakin luas tingkat pengungkapannya. Karena hal ini berhubungan dengan adanya akuntabilitas pemda terhadap

rakyat yang telah membayar sejumlah pajak maupun retribusi daerah.

Ukuran legislatif atau DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat dalam suatu daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Menurut Werry Darta (2002) dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarif Muhammad Damiri (2018) mengatakan bahwa DPRD mempunyai andil yang besar dalam mengawasi jalannya aktivitas pemda sehingga tercapai kinerja yang diinginkan. Pengawasan disini dapat diindikasikan bahwa DPRD juga ikut mengawasi atas laporan keuangan yang dibuat Pemda sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangannya.

Temuan Audit adalah kasus kasus yang ditemukan BPK dalam LKPD atas penyelewengan yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun aturan perundangan yang berlaku. Menurut Liestiani (2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi (2018) mengatakan bahwa dengan adanya temuan audit maka BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapannya. Sehingga semakin besar temuan BPK maka semakin besar pula jumlah pengungkapan yang akan diminta oleh BPK.

Faktor selanjutnya yaitu tingkat ketergantungan daerah. Tingkat ketergantungan adalah jenis pendanaan pemda yang berasal dari pemerintah pusat guna membiayai operasional pemda (Idris, Surasni dan Irwan, 2018). Pemda mengharuskan mengungkapkan yang lebih sebagai alat untuk memonitoring kinerja atas alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dana transfer yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin besar dana yang diberikan maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemda pada sumber dana lain dalam membiayai operasionalnya (Robbins & Austin, 1986) dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Haikal Firdaus (2023).

Terdapat penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa, tetapi berbeda dalam hasilnya, variabel *size* yang berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD yaitu penelitian dari Simbolon & Kurniawan, (2018). Namun, hasil yang berbeda dilakukan oleh Meri Andriani, dkk (2019). Rasio kemandirian, penelitian dilakukan oleh Simbolon & Kurniawan, (2018) menyatakan berpengaruh Sedangkan oleh Meri Andriani, dkk (2019) menyatakan tidak berpengaruh. Variabel ukuran legislatif penelitian dilakukan oleh Laupe et al., (2018) hasilnya positif dan Meli Marliani, dkk (2018) menyatakan tidak berpengaruh. Variabel temuan audit hasil yang menyatakan berpengaruh dilakukan oleh Rahayu & Mardiana (2016) namun hasil yang berbeda dilakukan oleh Meli Marliani, dkk (2018). Selanjutnya yaitu rasio ketergantungan, penelitian yang dilakukan oleh Suparno & Nanda (2016) hasilnya berpengaruh. Sedangkan oleh Meri Andriani, dkk (2019) hasilnya tidak berpengaruh.

Pemaparan riset terdahulu diatas mengemukakan adanya *research gap* karena diketahui nilai perolehan yang bermacam macam tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan. Variabel rasio ukuran pemda, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit dan tingkat

ketergantungan daerah menurut peneliti menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan. Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jaranganya penelitian tentang topik pengungkapan laporan keuangan dalam sektor pemerintahan karena terbatasnya informasi dan data pemerintah yang dapat diakses public ssecara bebas. Alasan memilih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel adalah karena adanya penelitian terkait tingkat pengungkapan LKPD yang hanya fokus pada skala yang lebih sempit, dan adanya penelitian Hilmi (2010) yang mengatakan bahwa pengungkapan paling tinggi dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan tersebut menjadi alasan bagi peneliti dalam mengangkat judul tentang **“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
2. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
3. Apakah ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
4. Apakah temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?

5. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
6. Apakah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit serta tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pengungkapan LKPD ?

C. Pembatasan Masalah

Objek penelitian ini menggunakan 35 LKPD kabupaten/kota di Jawa Tengah rentang waktu 2016 – 2020. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, jumlah legislatif, temuan audit Dan tingkat ketergantungan daerah dengan Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan LKPD. Teori yang digunakan yaitu teori Stakeholder, Teori Stewardship serta Theory Of Planned Behaviour.

D. Tujuan Manfaat

Melihat dari rumusan masalah yang disajikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
2. Mengetahui apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
3. Mengetahui apakah jumlah legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
4. Mengetahui apakah temuan audit daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

5. Mengetahui apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD
6. Mengetahui Apakah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, jumlah legislatif, temuan audit serta tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pengungkapan LKPD.

Manfaat secara teoritis dan praktisnya adalah:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa memperbanyak keilmuan akuntansi sektor publik tentang tingkat pengungkapan, memberikan penguatan terhadap dasar teori yang digunakan dan sebagai bahan rujukan peneliti lain yang relevan dengan tema yang diangkat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang keilmuan akuntansi dalam menjadi pendidik dan pejabat publik kelak

- b. Bagi pemerintah daerah

Peneliti berharap penelitian ini memberikan masukan pada pemda supaya patuh terhadap pengungkapan LKPD karena bentuk tanggung jawab pemda kepada masyarakat.

- c. Bagi pemerintah pusat/provinsi

Peneliti berharap penelitian ini menjadi pandangan terhadap

pemerintah pusat/provinsi tentang mengungkap LKPD pemda, gambaran kondisi keuangan pemda serta memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam mengambil keputusan tentang dana transfer dan lain sebagainya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan yang mendukung penelitian, penelitian serupa yang sejalan, kerangka berfikir serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari pembahasan yang meliputi penjelasan hasil analisis data dan metode analisisnya serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan serta saran penelitian

independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Temuan Audit (X_4) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_4 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,793 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,262, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen.

Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Dekeng Setyo Budiarto dan Luki Indarti (2019) yang menyatakan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Hal ini karena kecenderungan Pemda untuk menutupi pengungkapan informasi keuangan ketika memiliki masalah yang berkenaan dengan akuntabilitas misalnya dokumentasi anggaran dan akuisisi aset. Teori Steward tidak berjalan dengan baik karena pemda sebagai steward lebih memilih menutupi kesalahan kesalahan dari temuan audit sehingga pemda tidak berani mengungkapkan yang sebenarnya kepada masyarakat.

5. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang menunjukkan nilai koefisien regresi

adalah -125,805 dan bertanda negatif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 125,805 jika nilai variabel X_5 mengalami penurunan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tidak tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang tak searah antara variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_5 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai -12,880, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dadan Ramdhani (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini terjadi karena dalam era desentralisasi hubungan pusat dengan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada monitoring khusus pelaporan keuangan Pemda oleh Pemerintah Pusat. Dengan kurangnya kontrol ini dalam hal menentukan dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong Pemda sebagai steward untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Seharusnya pemda lebih tegas dalam bertindak terkait adanya monitoring dana dari pusat baik itu melalui perencanaan anggaran belanja sampai dengan pelaporan keuangannya. Hal tersebut akan memunculkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemda sehingga transparansi dana dapat terealisasi dengan baik.

6. Pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y).

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditemukan bahwa Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Tingkat keeratan hubungan dari ketiga variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , terhadap Y mempunyai hubungan yang positif. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , mempunyai hubungan yang baik dengan Y . Dari hasil koefisien determinasi atau R square (r) yang menunjukkan bahwa 67,4% Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) yang dipengaruhi oleh variable Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5).

Sisanya yaitu sebesar 32,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Fenomena tersebut dipertegas pula dengan pengaruh yang kuat antara Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit. Teori steward berjalan dengan baik karena apabila dalam total aset, PAD dan DAU

dapat dimonitoring dengan baik oleh DPRD maka hal ini akan berdampak pada rendahnya temuan BPK sehingga opini yang dikeluarkan berupa Wajar Tanpa Pengecualian yang nantinya dapat meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dianggap sebagai sebuah bentuk kemandirian pemda dan kemandirian DPRD dalam laporan keuangan agar menghasilkan laporan yang akuntabel, andal, transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Masyarakat sebagai principal tentunya akan merasa tenang karena pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Adapun kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah (X_1) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_1 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,189 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 1,320, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen
2. Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_2 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,010 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai -2,609, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.
3. Legislatif (X_3) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_3 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,736 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,338, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen.

4. Temuan Audit (X_4) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_4 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,793 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,262, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen..
5. Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap (Y). Hal tersebut dikarenakan X_5 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai --12,880, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.
6. Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). diketahui nilai sig. adalah 0,000 Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai F adalah Karena nilai $F_{hitung} 62,480 > 3,06$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dipenelitian ini, diantaranya :

1. variabel yang dipakai dipenelitian terbatas di ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit dan tingkat ketergantungan. Sedangkan masih banyak variable lainnya yang diduga memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD.

2. Sampel dipenelitian ini masih terbatas di Pemerintah Daerah kabupaten / kota provinsi jawa tengah.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini bias memberi bukti empiris bahwasanya variabel ukuran pemerintah, jumlah legislative dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD yang terdapat di kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2020.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan Pemda untuk senantiasa meningkatkan pengungkapan informasi keuangan yang sudah ditentukan dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda itu sendiri. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengungkapan bukan lagi sekedar tanggung jawab melainkan sudah menjadi kewajiban bagi Pemda.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada karyawan yang bekerja di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit.
3. Bagi Masyarakat Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit.
4. Bagi lembaga pendidikan memberikan motivasi lebih bagi para mahasiswa/i- nya untuk mengubah mindsetnya menjadi job creator, serta membantu meningkatkan skill para mahasiswanya dengan cara memberikan pelatihan- pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja maupun entrepreneur.
5. Menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan dan inovasi yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2016). Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kubu Bayu, D. J., & Triastuti, E. (2020). Using Giddens' structuration theory to examine the contesting participation of online mass media's journalists in Katadata. co. id framing. SEARCH (Malaysia), Gadang)
- Agustiningih, S. W., Murni, s., & Putri, G. A. (2017) . Audit findings, local government characteristics, and local government financial statement disclosure. Review of Integrative Business and Economics Research.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014-2016. Akuntansi dan Manajemen.
- Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). Tingkat ketergantungan fiskal dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
- Bayu, D. J., & Triastuti, E. (2020). Using Giddens' structuration theory to examine the contesting participation of online mass media's journalists in Katadata. co. id framing. SEARCH (Malaysia).
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). InFestasi, 11(2).
- Firdaus, MH (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit. Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 12(01).
- Gilligan, T. W., & Matsusaka, J. G. (2001). Fiscal policy, legislature size, and political parties: Evidence from state and local governments in the first half of the 20th century. National Tax Journal.
- Girsang, H. A. V., & Yuyetta, E. N. A. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada LKPD kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). Diponegoro journal of accounting, 4(4).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate (Edisi ke-7). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hamdani, S., & MM, M. A. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.. Aplikasi Analisis Multivariate (Edisi ke-7). Semarang: Universitas Diponegoro
- Hamdani, S., & MM, M. A. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Handayani, S. (2010). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(2).
- Hartati, Y. (2011). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Study Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman). *Jurnal Universitas Andalas*.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Kawedar, W. (2010). Opini audit dan sistem pengendalian intern (Studi kasus di Kabupaten PWJ yang mengalami penurunan opini audit). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 6(8).
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting analysis journal*, 1(1).
- Keuangan, B. P. (2018). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*. BPK-RI, Jakarta
- Keuangan, B. P. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. BPK-RI, Jakarta.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2).
- Laupe, S., Saleh, F. M., & Mattulada, A. (2018). Factors influencing the financial disclosure of local governments in Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3).
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(10).
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Buku 1, Edisi Enam, Salemba Empat*. Jakarta.
- Murdiansyah, I (2021) Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas yariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA : Journal of Islamic Banking And Finance*, 5(1).
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., & Liestiani, A. (2010). Disclosure of local government financial statement in Indonesia. University of Indonesia. Depok.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012, September). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. In *Forum: Simposium Nasional Akuntansi (Vol. 15)*
- Medynatul, M. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Nurtari, A., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintahan Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2014).
- Nomor, P. P. (71). Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

- Rahayu, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Rahman, N. J. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Dan Intensitas Moral Terhadap Intensi Karyawan Melakukan Tindakan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing) (Studi Empiris Pada Karyawan BUMD Kabupaten Temanggung) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Rahmawati, D. D., & Anik, S (2020). Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Ekonomi.
- RI, Kementerian Agama. Al-Qur`an dan Terjemahnya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Rini, R., & Sarah, A. (2014). Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Etikonomi*, 13(1).
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(1).
- Sari, W. A., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia Tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2).
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2).
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1).
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia.

- Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebeias Maret Surakarta.
- Suparno, S., & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2).
- Suwanda, D. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. PPM Jakarta. Jakarta.
- Syoftia, E., Puspa, D. F., & Ethika, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 9(1).
- Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia).
- Yosefrinaldi, Y. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera. *Jurnal Akuntansi*
- Wahyuni, D., Basri, H., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Perceived Behaviour Control Dan Religiusitas Terhadap Niat Memiliki Rumah Berbasis Pembiayaan Syariah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 6(2).

Lampiran daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. IDENTITAS

1. Nama : Indah Mutiara Safitri
2. Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 21 April 1999
3. Alamat rumah : RT/RW 06/02 Desa Wonopringgo
Kec. Wonopringgo
4. Alamat Tinggal : RT/RW 06/02 Desa Wonopringgo
Kec. Wonopringgo
5. Nomor Handphone : 085853539358
6. Email : mindah572@gmail.com
7. Nama Ayah : Amin Imron (Alm)
8. Pekerjaan Ayah : -
9. Nama Ibu : Darwati
10. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 01 WONOPRINGGO (2006 - 2011)
2. SMP : SMPN 01 WONOPRINGGO (2011-
2014)
3. SMA : SMK GONDANG (2014 - 2017)

Pekalongan, 17 Oktober 2023



Indah Mutiara Safitri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Muftara Safitri
NIM : 4317016
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : indah572@gmail.com
No. Hp : 0850 5353 9350

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS
LKD KABUPATEN /KOTA di PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2016-2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 November 2023



nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD